

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan dan kendala polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peranan polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*? 2) Apa sajakah kendala yang ditemukan polisi kehutanan dalam proses menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?. Penulis melakukan penelitian dengan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian 1) Polisi kehutanan telah melakukan semua tugas dan kewajibannya yang ditentukan oleh Peraturan Menhut RI Nomor P.75/Menhut-II/2014, pada Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Hutan dan Angka Kreditnya. Namun dalam melaksanakan tugasnya polisi kehutanan telah menemui kendala dalam prosesnya. 2) Kendala yang telah ditemukan adalah terbatasnya jumlah anggota kepolisian hutan hingga sangat sulit saat melakukan patroli dan berjaga pada pos sekaligus, keterbatasan jumlah dana oprasional dalam penyidikan *illegal logging* dan pencegahan *illegal logging* , kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan hutan dan koordinasi antara para aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *Peranan polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging*

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the role and obstacles of forestry police in tackling illegal logging crimes. The problem formulation in this research is: 1) What is the role of forestry police in tackling illegal logging crimes? 2) What obstacles do forestry police encounter in the process of dealing with illegal logging crimes? The author conducted research with the type of empirical juridical research. Research results 1) Forest police have carried out all their duties and obligations as determined by the Republic of Indonesia Minister of Forestry Regulation Number P.75/Menhut-II/2014, in Article 51 Paragraph (2) of Republic of Indonesia Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, in the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 17 of 2011 concerning Functional Positions of Forest Police and their Credit Scores. However, in carrying out their duties the forestry police have encountered obstacles in the process. 2) The obstacles that have been found are the limited number of forest police members making it very difficult to carry out patrols and guard posts at the same time, limited operational funds for investigating illegal logging and preventing illegal logging, lack of facilities and infrastructure, weak forest monitoring and coordination between law enforcement officers.

Keywords: The role of forestry police in combating illegal logging crimes